

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi seperti saat ini, semakin banyak tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat terutama yang berkaitan erat dengan kelancaran perekonomian dan pembangunan nasional. Dunia saat ini sudah memasuki era yang dinamakan Revolusi Industri 4.0. Menurut Wikipedia revolusi 4.0 memiliki empat prinsip yang memungkinkan perusahaan mengidentifikasi dan implementasi scenario 4.0 antarlain interoperabilitas, transparansi informasi, bantuan teknis, keputusan mandiri. Sementara menurut mckinsey global institute (Desember 2017) Teknologi manufaktur (otomotif) akan masuk pada tren otomatisasi dan pertukan data mencakup data mencakup sistem cyber-fisik, inter of thing dan digital komputerisasi. Indonesia Berdasarkan peta jalan making Indonesia 4.0 Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto telah menetapkan lima sector manufaktur yang diprioritaskan pengembangannya, lima sektor tersebut antara lain makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Dalam kaitan dengan Bidang otomotif industry 4.0 dapat memberikan manfaat bagi perkembangan transportasi di Indonesia. Dan contoh salah satu teknologi digital yang diterapkan pada transportasi melalui ride sharing seperti gojek uber dan Grab.

Salah satu sektor yang sangat vital dan strategis dalam menunjang pelaksanaannya adalah sektor transportasi dalam hal ini adalah transportasi darat. Menurut Bowersox (1981), transportasi adalah perpindahan barang atau penumpang dari suatu tempat ketempat lain, dimana produk dipindahkan ke tempat tujuan dibutuhkan. Dan secara umum transportasi adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu (barang dan/atau barang) dari suatu tempat ke tempat lain, baik dengan atau tanpa sarana. Transportasi darat merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional serta menerapkan hasil pembangunan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Penduduk Indonesia yang semakin banyak akan berdampak langsung pada peningkatan permintaan transportasi, apalagi ditambah dengan laju perekonomian Indonesia yang semakin baik. Pola perpindahan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya semakin banyak. Sehingga akan berdampak juga terhadap meningkatnya angka kecelakaan. Menurut Direktorat Lalu lintas Polda Metro Jaya pada 2018-2019 ada sekitar 657 orang meninggal dunia akibat kecelakaan kendaraan bermotor. Kemudian data statistik tahun 2015 jumlah sebaran kendaraan bermotor meliputi sepeda motor 98,88 juta unit, mobil penumpang 13,48 juta unit, mobil barang 6,6 juta unit, mobil bus 2,4 juta unit. Dengan sebaran kendaraan sebanyak itu masalah keselamatan pada bidang transportasi merupakan masalah yang rumit sehingga memerlukan penanganan serius. Langkah awal dan mendasar yang harus dilakukan adalah mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung era revolusi industri 4.0. Diantara solusinya dengan tersedianya kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan guna mendukung perekonomian dan pembangunan nasional untuk kemajuan Indonesia.

Transportasi memegang peranan sangat penting dalam perkembangan perekonomian dan pembangunan nasional diantaranya agar kegiatan pendistribusian orang, barang dan/atau jasa dapat berlangsung. Dalam rangka menjamin kelangsungan dan kelancaran hal tersebut maka transportasi harus diselenggarakan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta dilakukan secara profesional. Oleh karena itu perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya yaitu tersedianya moda transportasi darat (Kendaraan Bermotor) yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebuah kendaraan bermotor dapat dilaksanakan melalui kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan pasal 1 ayat (9), bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Menurut Undang–undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengertian persyaratan teknis adalah persyaratan yang mengatur tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pembuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan, dan penempelan kendaraan bermotor. Sedangkan pengertian laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan. Yang termasuk laik jalan berdasarkan Undang–Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi rem utama, efisiensi rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban serta kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Sebagai usaha untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan tersebut, maka dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwasannya Kendaraan Bermotor, Kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. Pengujian ini dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (Uji Tipe) dan Pemerintah Daerah (Uji Berkala). Uji Tipe dilaksanakan oleh Badan Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), sedangkan Uji Berkala dilaksanakan oleh Unit Pengujian Kendaraan Bermotor yang berada di Daerah/Kota diseluruh Indonesia.

Uji berkala adalah pengujian yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan. Tujuan dari pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran

yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Hal-hal yang harus dilaksanakan dan diperhatikan untuk mewujudkan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan hasil uji yang akurat dan optimal sesuai standar laik jalan, maka haruslah didukung sarana dan prasarana pengujian yang memadai, serta memiliki tenaga ahli dibidang pengujian kendaraan bermotor. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor menjelaskan bahwa uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu.

Dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga terampil dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan telah mendidik dan melatih calon–calon Penguji Kendaraan Bermotor melalui program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Untuk mendukung program studi tersebut, maka sesuai dengan desain kurikulum Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor pada semester akhir akan dilaksanakan Praktek Kerja Profesi (PKP) pada Kantor PKB di seluruh Indonesia. Salah satu kantor pengujian yang menjadi tempat praktek kerja profesi adalah Seksi Pengelola Sarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Semarang, yang beralamat di Jalan Raya Tambakaji Raya No. 5 Ngaliyan Semarang.

B. Tujuan

Pelaksanaan kegiatan PKP ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji kinerja Pegujian Kendaraan bermotor terhadap efektivitas tujuan diselenggarakannya Pengujian Kendaraan Bermotor di Indonesia;
2. Menerapkan, mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pada saat perkuliahan di Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal;
3. Belajar berapdatasi dan bersosialisasi dengan dunia kerja;
4. Meningkatkan wawasan dan membentuk kepribadian Taruna/i sebagai kader pembangunan dengan wawasan berfikir yang luas;
5. Meningkatkan keterampilan dan pemahaman tentang mekanisme pengujian kendaraan bermotor;

6. Menghimpun data-data yang diperlukan guna penyusunan Buku Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan lokasi PKP.

C. Manfaat

Praktek Kerja Profesi (PKP) ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya pada bidang pengujian kendaraan bermotor, antara lain:

Manfaat bagi pelaksana PKP yaitu:

1. Dapat mengetahui efektivitas Pengujian Kendaraan Bermotor di Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Semarang;
2. Sebagai salah satu sarana belajar untuk mendapatkan metode dan sistem kerja yang efektif dengan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Melatih pola pikir yang obyektif dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor;
4. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

Manfaat bagi tempat pelaksanaan PKP yaitu:

1. Mendapatkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
2. Membantu proses peningkatan dan pengembangan kinerja pelayanan dari Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Semarang.

Manfaat bagi penyelenggara PKP yaitu :

1. Sebagai salah satu tolok ukur guna meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik;
2. Sebagai salah satu sarana evaluasi dalam rangka penyempurnaan kurikulum dan silabus program studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor;
3. Sebagai bahan analisis dan kajian dalam bidang pengujian kendaraan bermotor guna peningkatan kinerja dan pelayanan yang efektif, efisien dan akurat serta akuntabel.

D. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi ini di Seksi Pengelola Sarana Transportasi Dinas Pehubungan Kota Semarang, dimana kegiatan ini difokuskan pada peran aktif Taruna secara langsung di Seksi Pengelola Sarana Transportasi Dinas Pehubungan Kota Semarang. Kegiatan ini tidak hanya mengamati aktifitas pengujian secara pasif melainkan juga ikut serta secara aktif dalam kegiatan yang berlangsung pada pengujian, baik kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis.

E. Sistematika Penulisan Laporan

Penulisan Buku Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor di Seksi Pengelola Sarana Transportasi Dinas Pehubungan Kota Semarang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini penyusun menguraikan tentang Latar Belakang, Tujuan, Manfaat, Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan Laporan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi ini.

Bab II : Metode Kegiatan

Pada bab ini penyusun menguraikan tentang Metode Pelaksanaan, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data serta Jadwal Kegiatan dari pelaksanaan PKP ini.

Bab III : Deskripsi Hasil Pengumpulan Data

Pada bab ini penyusun menguraikan tentang Gambaran Umum, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta Operasional dalam pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bab IV : Kinerja Seksi Pengelola Sarana Transportasi

Pada bab ini penyusun menguraikan tentang kinerja di Seksi Pengelola Sarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Semarang meliputi Unsur Administrasi dan Unsur Teknis Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Bab V : Kesimpulan & Saran

Bab ini berisi kesimpulan mengenai hasil penilaian kinerja Seksi Pengelola Sarana Transportasi yang menjadi tempat praktek kerja profesi beserta saran-saran perbaikannya dari penyusun.